



KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN THAILAND DALAM MENANGANI KASUS *SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING* DI INDUSTRI PERIKANAN THAILAND 2013-2017

Peri Anda Habeahan

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Slavery and Human Trafficking in Thailand is one of a transnational crimes that growing rapidly. According to Interpol data in 2009, this global fenomena is often happen especially in under-developed countries. This case was caused by globalization, broker's chain, low law enforcement, government involvement in corruption cases that took profit of this humanity crimes. This case had caused the migrants of Cambodia, Myanmar and Laos were sold in order to work in Thailand fishing industry sector. They had physical violence from the boad owner and crew, even among them have become murder victims. Forced kidnap, violence fraud on the boad and port caused all the migrants tried their best to e escape. This case became a challenge for United States as one of Thailand's partner in seafood export sector. International pressure from media, NGOs and international organizations were concerned on and asked US and Thailand to take decitions and policies. This research is aim to know the cooperation of these two countries in addressing the slavery and human trafficking case in Thailand's fishing industry in 2013-2017. This research type is descriptive-explanative by qualitative data analysis technique by literature data collection. This research result is explanation of government's policy of United States and Thailand in addressing the slavery and human trafficking in Thailand, through aid program of USAID and *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* (DRL) with many program's implementation, collaboration and cooperation on corruption handling.

Keywords: Slavery and Human Trafficking, Thailand Fishing Industry, United Stated and Thailand Cooperation

Pendahuluan

Perbudakan dan perdagangan manusia merupakan fenomena global yang terjadi khususnya di banyak negara berkembang di dunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang cepat berkembang. Fenomena ini pada umumnya disebabkan oleh banyaknya permintaan yang dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran. Selain faktor kemiskinan dan pengangguran, arus globalisasi juga mendorong seseorang untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di negara lain. Peningkatan arus imigrasi ini kemudian berdampak pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok terorganisir maupun tidak terorganisir dengan memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan finansial dan material dengan memperjual-belikan para calon pekerja. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis perdagangan manusia setiap tahunnya mencapai US\$ 32 miliar (International Labor Organization, 2008).

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia digolongkan juga sebagai bentuk perbudakan modern karena telah merampas hak dan kebebasan untuk hidup. Perbudakan yang dimaksud yaitu manusia yang digolongkan sebagai properti, yang bekerja untuk orang lain secara terpaksa untuk mendapatkan hal-hal tertentu khususnya upah, dimana kehidupan dan nasib budak, dikontrol oleh orang lain dengan waktu kepemilikan yang ditentukan oleh pemilik budak itu sendiri. Salah satu negara yang belum dapat memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia berdasarkan laporan dari video dokumenter *Environmental Justice Foundation* tahun 2013 adalah negara Thailand.

Sedikitnya peluang ekonomi di negara-negara tetangga, menjadikan Thailand sebagai negara tujuan bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan khususnya para migran yang berasal dari Burma - Myanamar, Laos dan Kamboja. Namun, mahalnnya biaya pengurusan dokumen imigrasi, rendahnya keterampilan calon tenaga kerja, melatarbelakangi para imigran tersebut memutuskan untuk masuk ke Thailand secara ilegal. Pada tahun 2009, Departemen Tenaga Kerja Thailand memperkirakan tambahan 116.000 pekerja sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Industri perikanan Thailand khususnya, menderita kekurangan tenaga kerja akut, untuk lebih dari 10.000 pekerjaan. Namun hal ini kemudian menyebabkan berkembangnya jaringan penyeludupan dan oknum-oknum yang bermain dalam mengambil keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 2013, dari penyelidikan EJF / *Environmental Justice Foundation* salah satu organisasi non-pemerintah, terdapat banyak migran yang bekerja sebagai buruh di sektor industri perikanan di Thailand, diperdagangkan dan dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari tanpa dibayar. EJF bekerja secara internasional dengan mempromosikan isu-isu perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dari bukti yang didapat di lapangan setelah proses investigasi, EJF menemukan sejumlah praktek perdagangan manusia yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil interview EJF dengan korban perdagangan manusia di Thailand yang berhasil lolos dan diselamatkan dari beberapa industri perikanan, para pekerja penangkap ikan kerap mendapatkan kekerasan fisik, penahanan paksa dan ancaman kekerasan di atas kapal dan di pelabuhan tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dan eksekusi jika mencoba melarikan diri.

Pembahasan

Pada tahun 2012, produk perikanan Thailand dalam catatan nilai ekspor mencapai US \$7,3 miliar. Sementara itu, menurut laporan *National Marine Fisheries Service* pada tahun 2015, 90 persen produksi perikanan Thailand diekspor ke banyak negara berkembang dan negara maju. Produk ekspor utama berdasarkan nilainya adalah tuna (US \$ 2,6 miliar) dan udang (US \$ 1,1 miliar). Adapun tujuan ekspor Thailand meliputi Negara Jepang (20,4%), Australia (5,4%), Kanada (4,4%) Inggris (3,9%) dan tujuan ekspor teratas adalah Amerika Serikat (22,8%). Dikarenakan sumber daya alamnya yang terbatas, Amerika memilih 'impor' sebagai jalan keluar untuk memenuhi permintaan para konsumen tersebut. *Seafood* (khususnya udang) yang telah diimpor dari berbagai negara termasuk Thailand, kemudian didistribusikan ke supermarket terkemuka di Amerika, yaitu empat *retail* global teratas: Walmart, Carrefour, Costco dan Tesco. Berdasarkan data Globefish dari tahun 2007 hingga 2012, Amerika mengimpor hasil laut khususnya udang dari Thailand di peringkat pertama pada angka 136.1 (ribu ton) mengalahkan jumlah pasokan udang dari negara Ecuador, Indonesia, dan India. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama penelitian penulis. Berdasarkan data yang diperoleh terkait jumlah praktek

dan korban perdagangan manusia di Thailand, tentu menjadi sebuah pertimbangan bagi negara Amerika selaku negara adidaya untuk melakukan kerjasamanya (dalam bidang ekspor/ impor hasil laut) dengan Thailand yang berlangsung cukup lama. Mengingat Amerika merupakan pencetus standar minimum TVPA dalam penghapusan perbudakan dan perdagangan manusia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti bagaimana peranan atau kerjasama Amerika sebagai mitra dagang Thailand bekerjasama dalam memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di industri perikanan Thailand pasca investigasi EJF pada tahun 2013.

Kronologi EJF

Pasca dikeluarkannya video dokumenter *'Sold to the Sea'* oleh *Environmental Justice Foundation* (EJF) tahun 2013, pemerintah Thailand dinilai gagal dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan dibidang perbudakan dan perdagangan manusia. Hasil investigasi *'Sold to the Sea'* yang berhasil menguak bagaimana para migran di industri perikanan Thailand diatas diperjualbelikan dan diperbudak di laut, menuai banyak reaksi dan tekanan internasional. Dalam suratnya kepada John F. Kerry – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, organisasi-organisasi internasional yang fokus dalam penanganan Hak Asasi Manusia meliputi *Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, Anti-Slavery International, Environmental Justice Foundation, Fairfood International, Finnwatch, Food Chain Workers Alliance, Fortify Rights, Humanity United, International Labor Rights Forum, National Consumers League, Slave Free Seas* dan *Walk Free* (antislavery.org) mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mempertahankan Thailand di posisi Tier 3 tingkatan terendah dalam TPVA, sebagai wujud aksi protes mereka pasca dikeluarkannya video dokumenter *'Sold to the Sea'* oleh EJF.

Amerika dalam laporannya menilai Pemerintah Thailand tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum khususnya peraturan dalam *The Trafficking Victims Protection Act* (B.E.2551 / 2008) dalam upaya penghapusan perdagangan manusia. Dalam penanganan kasus perbudakan dan perdagangan manusia di industri perikanan Thailand, Pemerintah Amerika Serikat memiliki lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap praktek perbudakan dan perdagangan manusia serta hak buruh secara global. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah diamankan dalam standar minimum TVPA atau TVPRA yang dikenal dengan lembaga *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* atau DRL. DRL hadir sebagai lembaga yang fokus dalam penanganan Demokrasi, HAM dan Buruh. Lembaga ini memiliki program dalam mempromosikan kebebasan dan demokrasi melindungi HAM serta Buruh di lebih dari 200 negara di dunia (state.gov/). Lembaga ini terbentuk pada tahun 1977 di bawah *U.S Department of State* khususnya di bawah lingkup Wakil Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Melalui DRL, Amerika Serikat menjalankan program termasuk diplomasi bilateral, keterlibatan multilateral, bantuan asing, pelaporan, penjangkauan publik dan sanksi ekonomi.

Bentuk Kerjasama AS dan Thailand

1. USAID

Dalam hal ini, untuk menunjukkan komitmennya membantu pemerintah Thailand menangani permasalahan perbudakan dan perdagangan manusia di industri perikanan Thailand, DRL menggandeng USAID untuk menjalankan program bantuannya di Thailand. Program bantuan USAID oleh Barrack Obama untuk negara-negara ASEAN termasuk Thailand ini bertujuan mendukung program regional baru untuk memperkuat kolaborasi lintas batas antara

sumber, transit, dan negara tujuan perdagangan manusia. Proyek \$1.000.000 pada Februari 2016 ini membantu meningkatkan koordinasi regional, khususnya melalui kerjasama bilateral tentang perlindungan, bantuan, pengembalian, dan reintegrasi untuk korban perdagangan manusia. Adapun Thailand, Malaysia, Burma, dan Laos menonjol sebagai prioritas utama dengan masing-masing negara telah menerima \$900.000 (USAID Asia Regional, 2016). Selain itu terdapat beberapa NGO yang mendapat bantuan dana dari AS untuk program penanganan dan pencegahan praktek perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand. Liberty Asia memperoleh bantuan dana sebesar \$650,000 dari USAID terhitung dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai 30 September 2018 atau total durasi kerjasama adalah 48 bulan. Adapun target dana tersebut digunakan dalam membantu pengumpulan data korban yang komprehensif dengan meningkatkan kapasitas organisasi non-pemerintah anti-perdagangan manusia di Asia, mencakup organisasi di Kamboja, Hong Kong, Thailand, Nepal, Burma dan Malaysia. Pengumpulan data ini bertujuan untuk analisis kuantitatif yang dapat menginformasikan para pemangku kepentingan terkait kasus perdagangan manusia di Thailand dengan memfasilitasi upaya pencegahan, perlindungan dan penuntutan secara efektif.

2. Kolaborasi dengan NGOs

Melalui Labor Rights Promotion Network USAID memberikan dana sebesar \$600.000 dengan durasi kerjasama terhitung dari 1 April 2016 – 31 Maret 2019 dengan total durasi 36 bulan khusus untuk negara Thailand. Bantuan dana tersebut ditargetkan untuk memberikan bantuan dan dukungan langsung untuk korban perdagangan manusia dalam industri perikanan termasuk layanan tempat tinggal, bantuan hukum dan bantuan perlindungan saksi, meningkatkan strategi perlindungan, memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat, penduduk desa dan nelayan serta mengoordinasikan penegakan hukum pada investigasi atau penuntutan. LPN dalam hal ini juga meningkatkan kesadaran tentang panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Panduan Praktik Buruh (GLP) di industri perikanan Thailand melalui media dan teknologi. Urban Light mendapatkan bantuan dan sebesar \$250,000 terhitung dari tanggal 1 Juni 2016 hingga 30 September 2018 dengan total durasi kerjasama 31 bulan. Adapun target negaranya mencakup negara Thailand sendiri dengan target tujuan untuk memperluas layanan kepada korban perdagangan manusia berjenis kelamin laki-laki dengan menyediakan layanan korban dan pelatihan keterampilan bagi individu dengan program pemberdayaan; dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran.

International Justice Mission memperoleh bantuan dana dari USAID senilai \$1.000.000 terhitung dari tanggal 1 Februari 2017 hingga 31 Januari 2019 dengan total 24 bulan. Adapun Misi *International Justice Mission* melalui bantuan ini adalah meningkatkan kapasitas sistem peradilan publik Thailand untuk merespon lebih baik terhadap perdagangan pekerja di industri perikanan. Ini dicapai dengan memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada polisi Thailand, jaksa, dan pekerja sosial, dengan fokus khusus pada penyelidikan dan penuntutan yang berpusat pada korban. Dalam melaksanakan programnya, USAID juga bekerjasama dengan *Issara Institute* di Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia di kapal penangkap ikan dengan menciptakan platform media sosial dan komunikasi yang dirancang untuk menyoroti masalah, mendidik pekerja yang berisiko diperdagangkan, dan memberi korban kemampuan untuk mengkomunikasikan pelanggaran hak asasi dan bantuan akses. *Issara Institute* merupakan salah satu NGO di Thailand yang menggunakan data terkumpul untuk bekerja dengan perusahaan Thailand dan pengecer global untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia dari rantai pasokan makanan laut.

3. Program U.S Government-Fund Anti Trafficking in Persons

Kerjasama Amerika dan Thailand pada tahun 2011 telah terjalin melalui program *U.S Government-Fund Anti Trafficking in Persons*. Program ini menyediakan bantuan dana bagi negara-negara dalam memerangi perdagangan manusia. Misi program bantuan dana oleh Amerika Serikat tersebut juga bertujuan untuk mengoordinasikan kebijakan antar-lembaga terkait pelaksanaan undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TIP) dan implementasi TPVA.

Adapun hasilnya, Thailand mengeluarkan *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* berisi rencana aksi Thailand untuk menangani perdagangan manusia. Mengadakan kampanye *anti-human trafficking*, meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* pada 16 November 2013 (OATPC, 2013: 11), mengembangkan layanan konseling bagi migran, mengembangkan *One Stop Crisis Center (OSCC)* dan menjalin kerjasama dengan *private sectors* dibidang industri perikanan guna mengembangkan sistem database dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Thailand (OATPC, 2013: 61). Adapun implementasi dari *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* adalah Biro Imigrasi meningkatkan identifikasi korban perdagangan manusia dengan memerintahkan semua kantor imigrasi provinsi untuk menggunakan formulir standar dalam mewawancarai migran. Pada 22 – 23 November 2012, 56.423 perwira polisi Thailand secara nasional berpartisipasi dalam workshop tentang *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008)* dan PVIP. Workshop ini diselenggarakan oleh kepala unit yang berkaitan dengan TIP di bawah Biro Polisi Metropolitan, Sektor Polisi Provinsi 1-9, Pusat Administrasi Perbatasan Selatan Thailand, dan Kantor Imigrasi. Di antara petugas ini, 37.644 berasal dari unit Pencegahan, 9.780 dari unit *Inquiry*, 8.996 dari unit Investigasi, dan 3 dari unit lain.

4. Kerjasama dalam Penanganan Korupsi dan Perdagangan Manusia

Adapun langkah-langkah upaya yang dimaksud AS untuk pemerintah Thailand tersebut mencakup *Registration of vessels* – agar Departemen Perikanan dan Departemen Kelautan Thailand mempercepat proses pendaftaran kapal penangkap ikan. *Intensified inspections* – agar badan-badan yang relevan untuk melakukan inspeksi intensif terhadap kapal-kapal penangkap ikan dan pekerja yang bekerja di kapal - dengan 77 kapal yang ditunjuk sebagai kapal patroli. *Establishment of Virtual Memory System / VMS Operation Centers* – membentuk Pusat Operasi sistem berbasis komputer untuk memfasilitasi pemantauan dan pelacakan guna mengumpulkan informasi terkait lokasi dan waktu di laut untuk tujuan pemeriksaan. *Subordinate legislation on VMS installation* – agar Departemen Perikanan dan Departemen Kelautan mengeluarkan undang-undang subordinasi untuk mewajibkan kapal penangkap ikan untuk memasang VMS dan menghubungkan sinyal VMS ke Pusat Operasi VMS. *Establishment of Port in-Port Out Control Centers* – membentuk pusat yang bertugas mengontrol pelabuhan diluar inspeksi. *Patrol and Inspection at sea* – melakukan inspeksi patroli di perairan Thailand untuk melakukan operasi penyelamatan korban yang diperdagangkan. *Registration of migrant fishery workers* – Mempercepat proses pendaftaran pekerja migran di bidang perikanan. Pemilik kapal dan kapten kapal harus secara ketat mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk melindungi tenaga kerja dalam Industri Perikanan Laut tahun 2014 dan memastikan bahwa pekerja migran diberi tingkat perlindungan yang sama seperti pekerja Thailand.

Dari langkah rekomendasi yang disarankan oleh AS diatas, upaya pembentukan *Port in-Port Out Control Centers* atau kantor pusat yang bertugas mengontrol aktifitas di setiap pelabuhan dan industri perikanan secara resmi diimplementasikan oleh Thailand pada tahun

2016. Pembentukan PIPO dinilai sebagai jalan keluar dalam mewujudkan keenam upaya lainnya diatas. Dalam kunjungannya ke provinsi Songkhla pada 28 April 2017, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar AS di Bangkok - Peter Haymond mengamati pemeriksaan kapal di *Forward Inspection Point* provinsi Songkhla, melakukan interaksi dengan petugas pelabuhan dan mengunjungi penampungan korban perdagangan manusia. Berdasarkan laman resmi Kedutaan Besar AS di Bangkok, kunjungan ini merupakan bentuk kerjasama berkelanjutan antara AS dan Thailand dalam mencapai pemahaman yang lebih besar tentang perbudakan dan perdagangan manusia, serta wujud upaya kedua negara dalam mengatasi masalah tersebut. Kedutaan Besar AS, DRL dan *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) bekerjasama dengan pemerintah Thailand mengembangkan sistem pengumpulan data strategis yang dirancang untuk menginformasikan, memantau serta meningkatkan keefektifan penanganan perdagangan manusia yang dikenal dengan sistem SIREN (*Strategic Information Response Network*). Selain itu AS dan Amerika juga bekerjasama melalui pembuatan aplikasi Amerika Serikat melalui FED's bekerjasama dengan pemerintah Thailand dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi yang dapat di unduh di *smartphone* berisi informasi tentang panduan seputar penanganan perdagangan manusia, informasi mengenai hak-hak buruh berupa upah minimum, jam kerja, kondisi dan keselamatan kerja.

Hasil Implementasi Program

Aplikasi ini dirilis pada August 2017 di Thailand dan terhitung pada 10 November 2017, aplikasi ini sudah di unduh sebanyak 2,849 kali. Pendistribusian surat kabar *Migrant Times Newsletter* yang didanai oleh bank FED's Amerika Serikat pada tahun 2015. Setiap bulannya 5000 buah brosur dan surat kabar berisi kampanye 'Safe Migrants' disebar ke sekolah dan perpustakaan dan semua provinsi di Thailand. Selain itu FED's bekerjasama dengan Pemerintah Thailand, NGOs dan IOM membuat animasi seputar perdagangan manusia dan imigran dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, YouTube dan Twitter dan membayar biaya iklan untuk setiap penayangan video animasi. Pada tahun 2016 DRL dibawah naungan *U.S Department of State* mendanai 1.4 juta dolar untuk menyelenggarakan sebuah workshop dan proyek di Thailand. Topik lokakarya tersebut adalah *Anti-Human Trafficking Workshop 2016*, berikut dengan dua proyek yaitu *Next Level* dan *CTIP Projects*. Proyek lokakarya *Next Level* bertujuan untuk menggambarkan kondisi perdagangan manusia di Thailand, memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia serta mencari solusi bersama dalam upaya pencegahannya. Workshop tersebut dihadiri oleh 50 representatif meliputi pemuda, akademisi, perwakilan polisi dari beberapa provinsi rawan perdagangan manusia. Sementara proyek *Next Level* menyoroti tema perlawanan terhadap perdagangan manusia dengan menjangkau industri perikanan yang rentan di Thailand Utara (Chiang Mai, Tak, Chiang Rai, Phetcabun) dan kawasan Thailand Selatan (Trang, Ranong, Pattani, Songkhla, Surat Tani). Proyek ini berkolaborasi dengan Kedutaan Besar di AS, Universitas Mae Fah Luang dan Universitas Rajabhat Suratthani. Adapun hasilnya, USAID bersama dengan LSM lokal melalui program CTIP (Combating Trafficking in Persons) mengembangkan *mobile app* atau aplikasi android dengan pilihan bahasa untuk memfasilitasi migran Myanmar, Kamboja maupun Laos di perindustrian ikan kawasan Thailand Utara dan Thailand Selatan, berupa informasi tenaga kerja terpercaya, serta informasi persyaratan imigrasi.

Kesimpulan

Melalui kerjasama yang telah ditempuh kedua negara, berdasarkan analisis pemikiran liberalis, baik Thailand maupun Amerika mendapatkan keuntungan setelah melakukan kerjasama. Adapun manfaat kerjasama bagi kedua negara khususnya di sektor ekonomi. AS dan Thailand tetap dapat melangsungkan kerjasama di bidang ekspor-impor hasil laut. Dalam hal ini, Thailand tetap dapat menambah devisa negaranya melalui ekspor, sementara AS dapat memenuhi permintaan pasokan hasil laut di negaranya. Disamping itu, komitmen AS sebagai pencetus standar minimum penghapusan perdagangan manusia secara global tercapai melalui program bantuannya kepada Thailand. Dengan demikian, Thailand dengan segala upaya yang berhasil ditempuh, pada tahun 2016 sudah tidak ditempatkan di posisi tier 3 yang artinya Thailand tidak akan dikenakan sanksi dan dapat memperoleh pinjaman *non-humanitarian* dari IMF maupun World Bank.

Referensi

- Dunne, Tim and Marriane Hanson. (2008). *Human Rights in International Relations* (Oxford: OUP, 2009), pp. 61-76.
- Sarosa, Samiaji. (2012). *METODE PENELITIAN KUALITATIF/ Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks.
- Carlsnaes Walter, Thomas Risse, Beth A. Simmons (2013), *Handbook Hubungan Internasional*, Nusamedia
- SP Varma (2007), *Teori Politik Modern*, terj. Yohanes Kristiarto SL, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Prof. Dr. Sugiyono (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Tjandra Surya, (2013), *Konvensi International Labour Organization*, Bandung
- SinlaEloe, Paul (2017), *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang-Jawa Timur
- Environmental Justice Foundation (2013), “*Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand’s Fishing Industry*”, England & Wales-United Kingdom
- Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives (2013), *Action Plan and Implementation by the Department of Fisheries in Addressing Labour Issues and Promoting Better Working Conditions in Thai Fisheries Industry*, Thailand
- International Organization for Migration/ IOM (2011), *Thailand Migration Report* pdf p.18
- Martin, P. (2004), *Thailand: Improving the Management of Foreign Workers International Labour Organization (ILO) and International Organization for Migration (IOM)*: Bangkok.
- International Organization for Migration/ IOM (2011), *Trafficking of fishermen in Thailand, Thailand*
- Fishwise (2013), *Human Rights abuses in the Seafood Industry*, Fishwise.org
- Environmental Justice Foundation (2010), *All at Sea: The About of Human Rights Aboard Illegal Fishing Vessels*, EJF
- Vachararutai (Jan) Boontinand (2010), *Domestic workers in Thailand: their situation, challenges and the way forward*, ILO Subregional Office for East Asia